

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perencanaan sosialisasi PKH, Pendamping PKH merupakan peran yang penting sebagai komunikator utama dalam strategi komunikasi Dinas Sosial. Pendamping PKH memiliki tiga elemen yakni kredibilitas yang kuat, daya tarik yang efektif, dan kekuatan yang memadai. Kredibilitas dinilai melalui kompetensi, sikap positif, tujuan komunikasi yang jelas, serta kepribadian yang ramah. Daya tarik dinilai dari kemampuan seorang komunikator untuk menarik perhatian dan minat audiens dengan faktor similarity, familiaritas, dan penampilan fisik. Sedangkan kekuatan dinilai dari kemampuan komunikator untuk memengaruhi orang lain melalui otoritas atau kekuasaan seperti kepercayaan diri dan kemampuan untuk “memaksakan” pendapat kepada audiens. Dengan mengintegrasikan ketiga elemen ini, pendamping PKH dapat secara optimal mengedukasi dan mengarahkan KPM dalam memahami hak dan kewajiban mereka serta pengambilan dana PKH yang benar.

Dalam merumuskan strategi komunikasi, Dinsos melakukan analisis terhadap kebutuhan khalayak dengan mempertimbangkan aspek sosiodemografik, profil psikologis, dan perilaku masyarakat. Dengan memahami karakteristik audiens, dinsos dapat menyesuaikan pesan dan pendekatan komunikasi untuk memastikan pesan tersebut sampai kepada audiens yang tepat. Pesan yang disampaikan bisa bersifat informatif, persuasif, atau edukatif, dengan bertujuan

untuk memberikan informasi, mengubah persepsi serta meningkatkan pemahaman audiens tentang prosedur dan penggunaan dana PKH yang benar.

Dalam pemilihan media Dinsos Kabupaten Batang memilih media baru untuk sarana strategi komunikasi kepada masyarakat dengan mengunggah konten terkait prosedur pengambilan bantuan sosial PKH, Terutama menggunakan Instragram @dinsosbatang, sebagai saluran komunikasi utama untuk menyebarkan informasi mengenai prosedur pengambilan bantuan sosial PKH. Postingan sosialisasi penyelewengan dana, bekerja sama dengan Saber pungi dan mengeluarkan surat edaran yang menegaskan bahwa orang lain dilarang memegang kartu atau membantu KPM dalam transaksi di ATM. Langkah-langkah ini merupakan upaya mitigasi untuk menghindari penyalahgunaan dana PKH, khususnya setelah adanya pemberitaan terkait penyelengan dana pada 2024. Dengan pemilihan media yang tepat, Dinsos berupaya memastikan informasi yang sampai ke masyarakat akurat dan mudah dipahami.

4.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan, diantaranya adalah terbatasnya waktu dan sumber daya yang tersedia untuk mengumpulkan data yang lebih komprehensif mengenai implementasi strategi komunikasi Dinas Sosial. Disamping itu, ruang lingkup penelitian ini hanya mencakup satu daerah (Kabupaten Batang), yang dapat membatasi generalisasi hasil temuan untuk daerah lainnya. Adapun pengumpulan data yang didasarkan pada wawancara dan observasi langsung juga memiliki keterbatasan subjektivitas dan interpretasi dari responden, sehingga dapat

mempengaruhi objektivitas hasil penelitian. Keterbatasan lainnya adalah terbatasnya akses terhadap data internal dan laporan yang lebih mendalam mengenai penyalahgunaan dana PKH, yang dapat mempengaruhi analisis yang lebih rinci tentang faktor penyebab dan dampaknya.

4.3 Saran

Dinas Sosial perlu menambah sumber daya manusia untuk mengelola media sosial, khususnya Instagram, guna memaksimalkan kampanye digital terkait Program Keluarga Harapan (PKH). Penggunaan alat penjadwalan konten seperti Buffer juga disarankan agar publikasi konten berlangsung secara konsisten dan efisien, serta menjangkau audiens pada waktu yang optimal.

Selain itu, penting untuk memperluas jangkauan kampanye digital ke media sosial Facebook, mengingat mayoritas penerima bantuan pemerintah berada dalam kelompok usia yang lebih aktif menggunakan platform tersebut. Pemanfaatan grup WhatsApp juga sangat direkomendasikan sebagai saluran komunikasi untuk menyampaikan informasi atau pengumuman terkait penyaluran dana bantuan sosial PKH secara cepat dan langsung kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat).

Tak kalah penting, Dinas Sosial juga harus meningkatkan pengawasan terhadap perangkat desa guna mencegah penyalahgunaan dana PKH. Di sisi lain, pelatihan rutin bagi pendamping PKH sangat diperlukan agar mereka lebih teliti dalam menyampaikan informasi dan lebih efektif dalam mengedukasi KPM, sehingga program dapat berjalan dengan lebih transparan dan tepat sasaran.